

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan berupaya menjadi bagian dari masyarakat sebagai lingkungan eksternal agar dapat menjaga eksistensi perusahaannya. Hal tersebut dapat menimbulkan hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat pada dasarnya merupakan mitra yang saling memberi dan membutuhkan. Sebuah proyek yang berhasil ditentukan oleh kontribusi dari kedua belah pihak tersebut. Perusahaan semestinya bukan hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi juga berkontribusi kepada masyarakat (Leksono dan Butar, 2018). Kegiatan suatu perusahaan juga berdampak pada pihak-pihak yang tidak berhubungan secara langsung dengan perusahaan. Pengaruh dan keberadaan kegiatan perusahaan juga sering kali merugikan kepentingan pihak tersebut. Jika dampak negatif yang timbul akibat aktivitas perusahaan tidak segera ditangani dengan baik, maka akan mempengaruhi jalannya aktivitas perusahaan (Wartyna dan Apriwenni, 2018).

Perusahaan dituntut menyeimbangkan kinerjanya dengan kepedulian sosial meskipun dilihat dari segi keuangan, perusahaan diharapkan memperoleh keuntungan maksimal, perusahaan tetap harus berkontribusi terhadap hal sosial dan lingkungan sekitar (Fauziah dan Asyik, 2019). Konsep tersebut diterapkan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Setiap perusahaan memiliki dampak yang berbeda terhadap lingkungan, mengakibatkan tanggung jawab yang berbeda pula. Perbedaan dalam industri memiliki dampak yang

signifikan terhadap tingkat tanggung jawab sosial. Dampak negatif yang besar akan mengakibatkan perusahaan bertanggung jawab lebih. Dampak negatif industri dapat memicu reaksi para *stakeholder*, sehingga perlu penyeimbangan lewat peran tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu strategi legitimasi perusahaan. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang berbeda maka pengungkapannya juga berbeda (Ramadhani dan Maresti, 2021).

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (2011) tanggung jawab sosial perusahaan ialah komitmen perusahaan untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada karyawan dan masyarakat luas. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan isu yang telah berkembang dan hal yang sangat krusial bagi perusahaan nasional maupun internasional. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah inisiatif bahwa bisnis tidak berjalan atas kepentingan pihak *shareholders* saja tetapi juga pihak *stakeholders* yaitu karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan pemerintah (Singal dan Putra, 2019). Perusahaan di Indonesia melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai bentuk motivasi terhadap pencapaian usaha dalam lingkungan sekitar perusahaan. Pengungkapan artinya tidak menyembunyikan atau tidak menutupi (Sukasih dan Sugiyanto, 2017). Pengungkapan merupakan pengeluaran informasi yang ditujukan bagi *stakeholder*. Sebuah pengungkapan oleh perusahaan memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang diperlukan dalam pelaporan keuangan dan menyediakan kebutuhan *stakeholder* yang kepentingannya berbeda-beda. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah metode pengeluaran informasi yang berhubungan dengan

aktivitas perusahaan baik itu sosial maupun lingkungan perusahaan (Hackston dan Milne, 1996).

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang mewajibkan perusahaan berkaitan dengan sumber daya alam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga mengatur tanggung jawab sosial perusahaan dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) paragraf 12 tentang penyajian laporan keuangan yang menyatakan bahwa entitas dapat menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tersebut diluar lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

Peraturan yang terkait tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak ditetapkan, namun peraturan tersebut belum menyebutkan secara detail tentang apa saja informasi yang harus diungkapkan dan bagaimana cara pengungkapannya, sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan perusahaan dirasa belum terarah. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh IAI tersebut, pelaporan tentang pengungkapan di dalam laporan tambahan saat ini masih bersifat sukarela, namun perusahaan yang telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk mengungkapkannya agar masyarakat mengetahui bahwa perusahaan

telah melaksanakannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengungkapkan melalui *sustainability report*.

Sustainability report adalah laporan yang bukan hanya memuat informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan, melainkan informasi non keuangan terdiri dari aktivitas sosial dan lingkungan yang dapat mendorong perusahaan untuk bertumbuh secara terus-menerus demi mencapai pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder* (Prabaningrum dan Pramita, 2019). *Sustainability report* menjelaskan hasil kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih kompleks meliputi kebijakan ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta dampak kinerja perusahaan dan tanggung jawab atas produk. Sebuah *sustainability report* dapat membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan dampak yang dihasilkan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan ini juga dapat dikatakan sebagai kunci bagi perusahaan untuk mengatur perencanaan serta dampak yang dihasilkan baik itu positif maupun negatif. Laporan ini dianggap sebagai sinonim dari pelaporan non-keuangan, pelaporan *triple bottom line*, dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang kegiatannya berhubungan langsung dengan sumber daya alam yaitu pengangkutan bahan galian untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kebutuhan manusia (Limbong, 2019). Perusahaan pertambangan termasuk salah satu sektor industri *high profile* yang memiliki visibilitas dari *stakeholder* dan juga sering memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya. Isu tentang pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ternyata tidak membuat pengungkapan

dilakukan dengan baik oleh semua perusahaan, termasuk perusahaan pertambangan. Berikut adalah data penerbitan *sustainability report* dari sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Penerbitan *Sustainability report* Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 - 2020

TAHUN	POPULASI	JUMLAH SR	PERSENTASE SR
2016	48	7	14.58%
2017	48	10	20.83%
2018	50	11	22.00%
2019	50	15	30.00%
2020	48	18	37.50%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perusahaan pertambangan yang menerbitkan *sustainability report* hanya sebesar 14,58% pada tahun 2016 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 sebesar 37,50%. Akan tetapi, perusahaan pertambangan yang menerbitkan *sustainability report* masih di bawah 50% yang berarti tergolong dalam kategori rendah. Rendahnya penerbitan *sustainability report* tersebut karena masih bersifat sukarela.

Perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* biasanya menggunakan standar pelaporan. Kerangka yang paling sering dipakai sebagai standar pelaporan adalah standar GRI. *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan sebuah organisasi *non-profit* berskala internasional yang mempunyai tujuan untuk membuat *sustainability report* sebagai program rutin bagi seluruh organisasi dan dapat dijadikan seperti pelaporan keuangan yang dapat dibandingkan antar

periode (Erkanawati, 2018). GRI terus memperbarui standar sampai yang terbaru adalah G4 yang dikeluarkan pada bulan Mei 2013. GRI telah berhasil mengembangkan kerangka yang bersifat umum dan telah disetujui oleh berbagai *stakeholder* di dunia, serta dapat diaplikasikan dalam melaporkan kinerja keberlanjutan dari sebuah organisasi. Sampai tahun 2016, GRI-G4 telah dijadikan sebagai standar utama oleh banyak organisasi di Indonesia (Habib, 2017). Berikut adalah data pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan pertambangan diprosikan dengan standar GRI.

Tabel 1.2

**Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pertambangan berdasarkan standar GRI**

No.	Peneliti	Sampel Penelitian	Periode Penelitian	Rata-rata Pengungkapan
1.	Krisna dan Suhardianto (2016)	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI	2010-2012	27.66%
2.	Setiawan, dkk (2018)	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI	2013-2015	17.44%
4.	Wartyna dan Apriwenni (2018)	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI	2013-2016	15.84%
5.	Ruroh dan Latifah (2018)	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI	2015-2016	43.11%
6.	Yani dan Suputra (2020)	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI	2016-2018	27.55%

Sumber: Artikel ilmiah terdahulu, (2022)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan yang terdaftar di

BEI bervariasi antar tahun, akan tetapi masih relatif rendah dengan rata-rata di bawah 50%. Beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan antara lain kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan *leverage*. Faktor pertama adalah kepemilikan asing, kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing seperti perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, pemerintah, atau badan hukum yang berada di luar negeri dibagi seluruh jumlah modal saham yang beredar (Yani dan Suputra, 2020). Kepemilikan asing yang tinggi mengindikasikan manajer untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang tinggi pula dikarenakan kepemilikan asing termasuk pada pihak yang memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, bahkan negara asing sering menghiraukan aktivitas yang berhubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Yani dan Suputra (2020) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Sari (2020), dan Kusumawati (2018) yang juga mendapatkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Akan tetapi, hasil tersebut berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Singal dan Putra (2019) dan Gulzar, dkk (2019) mendapatkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Faktor kedua adalah kepemilikan institusional, kepemilikan institusional merupakan suatu kondisi dimana pemegang saham perusahaan berupa pihak yang termasuk institusi seperti pemerintah, yayasan, koperasi, perusahaan asuransi,

perusahaan investasi, Perseroan Terbatas (PT), bank dan lainnya (Romadhona dan Wibowo, 2020). Pihak institusi yang menjadi pemegang saham dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam *annual report* sebagai bentuk transparansi kepada *stakeholder* untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Yani dan Suputra (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Singal dan Putra (2019) dan Kusumawati (2018) yang juga mendapatkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil tersebut berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Romadhona dan Wibowo (2020) dan Gulzar, dkk (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Faktor ketiga adalah *leverage*, *leverage* merupakan rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Perusahaan yang memperoleh dana melalui utang (*financial leverage*), mengakibatkan pengawasannya tinggi dilakukan oleh kreditor terhadap aktivitas perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi, maka aktiva perusahaan didanai oleh utang, dimana hal tersebut akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan meningkat sejalan dengan meningkatnya rasio *leverage* perusahaan (Yani dan Suputra, 2020). Penelitian

yang dilakukan oleh Ramadhani dan Maresti (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) dan Alfiah (2018) yang juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil tersebut berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Sudana (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Atas tidak konsistennya beberapa penelitian sebelumnya, maka penelitian ini melakukan penelitian ulang tentang kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan *leverage* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini mereplikasi penelitian terdahulu oleh Yani dan Suputra (2019). Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu ukuran dewan direksi. Ukuran dewan direksi merupakan jumlah seluruh direksi yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran dewan direksi memproyeksikan tata kelola sebuah perusahaan dikarenakan pengambilan keputusan melihat berdasarkan pendapat dewan direksi. Direksi memiliki tugas untuk merencanakan strategi tanggung jawab sosial dalam berkontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat (*International Finance Corporation*, 2018). Teori legitimasi yang menyatakan pihak manajemen berupaya mendapatkan legitimasi dari para *stakeholder*. Direksi merupakan bagian dari pihak manajemen perusahaan sebagai elemen tertinggi yang bertanggungjawab atas legitimasi dari para *stakeholder* (Suwandy dan Rahayuningsih, 2020). Perbedaan penelitian yang

kedua terletak pada rentang tahun penelitian. Rentang waktu pada penelitian sebelumnya adalah tahun 2016-2018 sedangkan penelitian ini menambahkan rentang tahun penelitian dari tahun 2016-2020 agar menggambarkan kondisi dan tren dari pengaruh setiap variabel yang diteliti terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan di Indonesia secara aktual sehingga penelitian lebih lengkap dan akurat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020”**.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan:

- a. Variabel dependennya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Variabel independennya adalah kepemilikan asing, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran dewan direksi.
- c. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah metode pengeluaran informasi yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan baik itu sosial maupun lingkungan perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk mengutarakan tanggung jawabnya yang telah dijalankan selama periode tertentu. Perusahaan pertambangan termasuk industri *high profile* yang harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam langsung. Perusahaan yang mematuhi peraturan pemerintah dan mau berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dapat dilihat dari seberapa jauh perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan tersebut dapat dilihat dalam *sustainability report* perusahaan yang diterbitkan dalam periode tertentu. Akan tetapi, penerbitan *sustainability report* dan rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan pertambangan masih relatif rendah. Faktor yang diduga dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu kepemilikan asing, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran dewan direksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kepemilikan asing, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan asing, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran dewan direksi pada perusahaan pertambangan periode 2016-2020. Berdasarkan teori legitimasi menyatakan bahwa pentingnya suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk masyarakat sekitar, supaya masyarakat mengakui dan mendukung bahwa perusahaan berkontribusi nyata membantu masyarakat dan daerah tempat beroperasi. Adanya hubungan teori legitimasi dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan harus mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholder* melalui laporan, sehingga perusahaan mendapatkan legitimasi. Selain teori legitimasi, menurut teori *stakeholder*, pihak *stakeholder* yang meliputi pemegang saham mayoritas (kepemilikan institusional), pemegang saham asing, dan kreditur (*leverage*) yang menjadi target dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dewan Direksi juga menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai pengaruh kepemilikan asing, kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam pengembangan ilmu ekonomi, terkhusus di bidang akuntansi. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian berikutnya mengenai kepemilikan asing, kepemilikan institusional, *leverage*, ukuran dewan direksi, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi investor dan calon investor

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran mengenai laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi baik bagi investor maupun calon investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan dalam mempertimbangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam investasi yang bukan hanya berpegang pada ukuran moneter semata melainkan bagaimana perusahaan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah menjadi kewajiban.

b. Bagi perusahaan dan pihak manajemen

Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan yang menyangkut pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan peringatan bagi pihak manajemen dan perusahaan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial sangat penting bagi

perusahaan. Apabila tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tergolong cukup rendah, maka harus diambil keputusan untuk memperbaiki kinerja tanggung jawab sosial perusahaan beserta pengungkapannya.

c. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengarahannya sebagai pengendali atas tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, diharapkan juga meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh dari perusahaan.

